LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

#### 1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

#### A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI



GUBERNUR ... (Nama Provinsi) PERATURAN DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi) NOMOR ... TAHUN ...

#### **TENTANG**

(nama Peraturan Daerah)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR (Nama Provinsi),

Menimbang: a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1....;

2. ...;

3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi)

dan

GUBERNUR ... (Nama Provinsi)

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

BAB II

...

Pasal ... BAB ... (dan seterusnya) Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi).

Ditetapkan di ... pada tanggal ... GUBERNUR ... (Nama Provinsi) tanda tangan NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi), tanda tangan NAMA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

# B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



BUPATI/WALIKOTA ..... (Nama Kabupaten/Kota) PROVINSI....... (Nama Provinsi)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama kabupaten/kota) NOMOR ... TAHUN ...

#### **TENTANG**

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA (nama kabupaten/kota),

Menimbang: a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1....;

2. ...;

3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)

dan

BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

BAB II

• • •

BAB ... (dan seterusnya) Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota).

Ditetapkan di ... pada tanggal ... BUPATI/WALIKOTA...(nama kabupaten/kota),

tanda tangan NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota),

tanda tangan NAMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

#### II. PERATURAN KEPALA DAERAH

#### A. Peraturan Gubernur

Menimbang



# GUBERNUR ... (Nama Provinsi) PERATURAN GUBERNUR ... (Nama Provinsi) NOMOR ... TAHUN ...

#### **TENTANG**

(Judul Peraturan Gubernur)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ..., (Nama Provinsi) : a.bahwa....; b.bahwa...; c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. .....;

2. ....; 3. dan seterusnya....;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ... (Judul Peraturan Gubernur).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

BAB II Bagian Pertama

•••••

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

# BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

# BAB .. KETENTUAN PENUTUP Pasal ...

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi... (Nama Provinsi).

Ditetapkan di ... pada tanggal GUBERNUR ..., (Nama Provinsi)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI ..., (Nama Provinsi)

(Nama)

BERITA DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

## B. Peraturan Bupati/Walikota



# BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) PROVINSI..... (Nama Provinsi)

# PERATURAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) NOMOR ... TAHUN ...

#### **TENTANG**

(Judul Peraturan Bupati/Walikota)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1; 2;
	3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG (Judul Bupati/Walikota).
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
Dalam Peratu:	ran Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:
	BAB II
	Bagian Pertama

BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal ...

Paragraf 1
Pasal ...
BAB ...

#### BAB ..

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di ... pada tanggal BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kabupaten/ Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA..., (Nama Kabupaten/Kota)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

## III. PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

#### A. Peraturan Bersama Gubernur



PERATURAN BERSAMA GUBERNUR... (Nama Provinsi)
DAN GUBERNUR... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

#### TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ... (Nama Provinsi) dan GUBERNUR ..., (Nama Provinsi)

Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa;
	c. dan seterusnya;
Mengingat	
Mengingat	: 1;
	2;
	3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: PERATURAN BERSAMA GUBERNUR (Nama
1	Provinsi) DAN GUBERNUR (Nama Provinsi)
	TENTANG (Judul Peraturan Bersama).
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
Dalam Peratu	ran Bersama ini yang dimaksud dengan:
	BAB II
	Bagian Pertama
	Paragraf 1
	Pasal
	radar
	DAD
	BAB

# BAB ... KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

# BAB .. KETENTUAN PENUTUP Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi) dan Berita Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi)

> Ditetapkan di ... pada tanggal

GUBERNUR..., (Nama Provinsi) GUBERNUR..., (Nama Provinsi)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan

Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI ..., (Nama Provinsi)

(Nama Provinsi)

(Nama) (Nama)

BERITA DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ... BERITA DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

## B. Peraturan Bersama Bupati/Walikota



PROVINSI... (Nama PROVINSI)

PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) DAN BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang	: a. bahwa;
	b. bahwa;
	c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1;
	2;
	3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota) DAN BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG (Judul Peraturan Bersama).
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
Dalam Peratu	ran Bersama ini yang dimaksud dengan:
	BAB II
	Bagian Pertama
	Paragraf 1
	Pasal
	BAB
	Pasal
	BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

# BAB .. KETENTUAN PENUTUP Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota) dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ... pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota) BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH

KAB/KOTA ..., (Nama Kab/Kota) KAB/KOTA ..., (Nama Kab/Kota)

(Nama) (Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ... BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

#### IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD

#### A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD PROVINSI



#### PERATURAN DPRD PROVINSI... (Nama Provinsi) NOMOR ... TAHUN ...

#### **TENTANG**

(Judul Peraturan DPRD Provinsi)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD PROVINSI... (Nama Provinsi),

Menimbang: a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1....;

2. ...;

3. dan seterusnya ...;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ... (Nama Peraturan DPRD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

... Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA DPRD PROVINSI, (ATAU
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI) ...
(Nama Provinsi)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi), tanda tangan NAMA

BERITA DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD PROVINSI, ..... (Nama Provinsi)

#### B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN/KOTA



PROVINSI..... (Nama Provinsi)

PERATURAN DPRD KABUPATEN/ KOTA... (Nama Kabupaten/Kota) NOMOR ... TAHUN ...

#### **TENTANG**

(nama Peraturan DPRD Kabupaten/Kota)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN/ KOTA... (Nama Kabupaten/Kota),

Menimbang: a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1....;

2. ...;

3. dan seterusnya ...;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ...(Nama Peraturan DPRD Kabupaten/kota).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

BAB II

• •

BAB ... (dan seterusnya) Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota ...

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA,
(ATAU WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN/KOTA) ... (Nama
Kabupaten/Kota)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/kota), tanda tangan NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (Nama Kabupaten/kota) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN/KOTA ...... (Nama Kabupaten/kota)

#### V. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

#### A. Keputusan Gubernur



# 

ul Venutuson Gubernur)

	(Judul Keputusan Gubernur)
	GUBERNUR, (Nama Provinsi)
Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa;
Mengingat	c. dan seterusnya; : 1; 2;
Memperhatikan	3. dan seterusnya; 1; 2;
	3. dan seterusnya; (jika diperlukan)
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATŪ	:
KEDUA	:
KETIGA	•

ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ..... GUBERNUR..., (Nama Provinsi)

• .....

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEEMPAT

KELIMA

KEPALA BIRO HUKUM,

# B. Keputusan Bupati/Walikota

Salinan

TTD NAMA NIP



PROVINSI..... (Nama PROVINSI)

# KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) NOMOR ... TAHUN ... **TENTANG**

# (Judul Keputusan Bupati/Walikota)

BUI	PATI/WALIKOTA, (Nama Kabupaten/Kota)
Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa;
Mengingat	c. dan seterusnya; 1; 2; 3. dan seterusnya;
Memperhatikan	3. dan seterusnya; 1; 2; 3. dan seterusnya; (jika diperlukan)
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA	: : : : : Keputusan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal BUPATI/WALIKOTA, (Nama kab/Kota)
	(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
alinan sesuai dengan a	aslinya
KEPALA BAGIAN HUI	KUM,

# VI. KEPUTUSAN DPRD

A. Keputusan DPRD Provinsi



	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
KEPU	UTUSAN DPRD PROVINSI (Nama Provinsi) NOMOR TAHUN
	TENTANG
	(Judul Keputusan DPRD)
PIM	PINAN DPRD PROVINSI, (Nama Provinsi)
Menimbang Mengingat	: a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya: : 1;
Memperhatikan	2.       ;         3. dan seterusnya.       ;         : 1.       ;         2.       ;         3. dan seterusnya.       ;
	(jika diperlukan)
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA	:: :: : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD PROVINSI, (Nama Provinsi)
ı sesuai dengan a	(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) aslinya

Salinan

SEKRETARIS DPRD PROVINSI ..... (Nama Provinsi)

## B. Keputusan DPRD Kabupaten/Kota



PROVINSI	(Nama	PROVINSI)
----------	-------	-----------

# KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN/KOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) NOMOR ... TAHUN ...

#### **TENTANG**

(Judul Kenutusan DPRD Kabupaten/Kota)

(	odddi Reputasan Di RD Rasupaten, Rota,
PIMPINAN D	PRD KABUPATEN/KOTA, (Nama Kabupaten/Kota)
Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1; 2; 3. dan seterusnya;
Memperhatikan	: 1; 2; 3. dan seterusnya; (jika diperlukan)
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA	: : : : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD

KABUPATEN/KOTA...,(Nama kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN/KOTA ..., (Nama kab/Kota)

# VII. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD

# A. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi



KEPUTUS	SAN PIMPINAN DPRD PROVINSI (Nama Provinsi)
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)
PIM	IPINAN DPRD PROVINSI, (Nama Provinsi)
Menimbang  Mengingat  Memperhatikan	: a. bahwa
Menetapkan	MEMUTUSKAN:
KESATŪ KEDUA	
KETIGA KEEMPAT	:
KELIMA	:
	Ditetapkan di pada tanggal KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD PROVINSI, (Nama Provinsi)
	(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
n sesuai dengan	aslinya
RETARIS DPRD	

Salinan

SEKE PROVINSI ..., (Nama Provinsi)

# B. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota



PROVINSI..... (Nama PROVINSI)

# KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA ... (Nama Kabupaten/Kota)

# NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota)
PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang	: a. bahwa;
	b. bahwa;
	c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1;
	2;
	3. dan seterusnya;
Memperhatikan	: 1;
	2;
	3. dan seterusnya;
	(jika diperlukan)
	,
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	
KEDUA	•
KETIGA	•
KEEMPAT	•
KELIMA	· :
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD
	KABUPATEN/KOTA, (Nama kab/Kota)
	(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN/KOTA ..., (Nama kab/Kota)

## VIII. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

TTD NAMA NIP

# A. Keputusan Badan Kehormatan DPRD Provinsi



# KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD PROVINSI ... (Nama Provinsi)

NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD PROVINSI, (Nama Provinsi)
Menimbang : a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya:  Mengingat : 1; 2.
3. dan seterusnya;  Memperhatikan : 1; 2; 3. dan seterusnya; (jika diperlukan)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KESATU: KEDUA: KETIGA: KEEMPAT: KELIMA:
Ditetapkan di pada tanggal KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD PROVINSI, (Nama Provinsi)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI, (Nama Provinsi)

# B. Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota



PROVINSI..... (Nama PROVINSI)

# KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN/KOTA ... (Nama Kabupaten/Kota)

## NOMOR ... TAHUN ...

#### TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota) KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN/KOTA..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang	: a. banwa	
O	b. bahwa	
	c. dan seterusnya	
Mengingat	: 1	
	2	
	3. dan seterusnya	
Memperhatikan	: 1;	
•	2;	
	3. dan seterusnya;	
	(jika diperlukan)	

#### MEMUTUSKAN:

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :

KELIMA

Menetapkan:

Ditetapkan di ...... pada tanggal ...... KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN/KOTA..., (Nama kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN/KOTA

> TTD NAMA NIP

> > MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690824 199903 1 001